

**ANALISIS KEBIJAKAN DISKRESI PEMERINTAH PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN
KETENTUAN PASAL 27 PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DAN
ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama: Fadhil Adrian

NIM: 205160195

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**ANALISIS KEBIJAKAN DISKRESI PEMERINTAH PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN
KETENTUAN PASAL 27 PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DAN
ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama: Fadhil Adrian

NIM: 205160195

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Fadhil Adrian
N.I.M : 205160195
Program Peminatan Profesi : Pegawai Pemerintahan

Judul Skripsi

“Analisis Kebijakan Diskresi Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19 Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan”

Disetujui

Pembimbing



Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fadhil Adrian Rafqi Pasha
NIM : 205160195
Program Peminatan Profesi : Pegawai Pemerintahan

Judul Skripsi

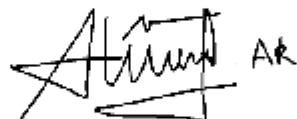
ANALISIS KEBIJAKAN DISKRESI PEMERINTAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 27 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DAN ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 29 Juli 2021 dan telah dinyatakan Lulus serta diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

1. Ketua : Dr. Rasji, SH., MH
2. Anggota : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
: Dr. Tundjung Herning Sitabuana., SH., M.Hum., CN

Jakarta, 5 Agustus 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ahmad Redi". To the right of the signature, the letters "AR" are handwritten.

(Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Analisis Kebijakan Diskresi Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19 Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan.**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidak sempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi atas kesabarannya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
7. Orangtua tercinta Ayah dan Ibu atas dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
8. Seluruh keluarga besar HTF yang yang telah mendukung dan membantu Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
9. Seluruh keluarga besar HTF 16 yang yang telah mendukung dan membantu Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
10. Teman-teman FH UNTAR yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

11. Terima kasih kepada Shintamy Nesyicha Syahril, S.H telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Ovannyalda Chrismananta, S.H telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Terima kasih kepada Virlieni Erika Putri, S.H telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Terima kasih kepada Yolanda Pricilla, S.H. telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
15. Terima kasih kepada Samuel Binoto, S.H. telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
16. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, Juli 2021

(Fadhil Adrian)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	14
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II. KERANGKA TEORETIS	22
A. Teori Administrasi Pemerintahan	22
B. Teori Kewenangan	24
C. Teori Diskresi	30
D. Teori Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	36
E. Teori Kepastian Hukum	40
BAB III. DATA HASIL PENELITIAN	47
A. Penggunaan dan Pengawasan Diskresi dalam Penanganan Covid-19.....	47

B. Potensi Penyimpangan Setelah Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang telah Disepakati menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020	53
C. Perlindungan Penggunaan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020	61
D. Data Hasil Wawancara	69
BAB IV. ANALISIS PERMASALAHAN	78
BAB V. PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

ABSTRAK

- (A) Nama : Fadhil Adhian (205160195)
- (B) Judul Skripsi: **“Analisis Kebijakan Diskresi Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19 Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan”**
- (C) Halaman : vii + 98 + 2021.
- (D) Kata Kunci : Urgensi, Pemberian Asimilasi, Hak Integrasi, Narapidana.
- (E) Isi Abstrak

Diskresi sebagai salah satu instrumen hukum Pemerintah dengan berbagai fungsi dan kegunaannya, tentu tidak dilakukan dengan cara yang sembarangan, namun terdapat serangkaian prosedur-prosedur yang harus dipenuhi meskipun tidak dikordinir oleh suatu SOP (*Standar Operasional Prosedur*) terkait langkah-langkah untuk menggunakan diskresi. Permasalahan yang dihadapi dalam skripsi ini adalah bagaimanakah Pemerintah seharusnya membuat diskresi dalam keadaan pandemic Covid-19 yang dikaitkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan darurat yang ditempuh Pemerintah melalui Perppu ini sepenuhnya dilakukan dengan itikad baik untuk mengatasi suatu kondisi/kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dalam hal ini karena Covid-19. Namun apabila dalam pelaksanaan Perppu terdapat pihak yang beritikad tidak baik dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kondisi tersebut bukanlah termasuk yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2). Kedepannya perlu dibuat peraturan pelaksana atas Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam bentuk Peraturan Presiden yang mengatur mengenai mekanisme pertanggungjawaban, sebab perlu diakui ketentuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dalam perppu tersebut masih belum jelas. Hal ini perlu ditegaskan untuk memberikan kepastian hukum kepada publik bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk penanganan pandemi akan jelas pertanggungjawabannya, sebab pertanggungjawaban yang jelas adalah salah satu bentuk pengawasan konkret untuk mencegah adanya korupsi.

- (F) Acuan : 55 (1980 - 2021)
- (G) Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Fadhil Adhian.

DAFTAR SINGKATAN

AAUPB	adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
APBN	adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara
FPJP	adalah Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
KSSK	adalah Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan
LPS	adalah Lembaga Penjamin Simpanan
OJK	adalah Otoritas Jasa Keuangan
Perppu	adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Sop	adalah Standar Operasional Prosedur
UU	adalah Undang-Undang
UUD 1945	adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945